



Indeks
Kemahalan Konstruksi
Kabupaten Lebong
Tahun 2014



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN LEBONG**
BPS-Statistics of Lebong Regency



**INDEKS
KEMAHALAN
KONSTRUKSI**

**KABUPATEN
LEBONG**

TAHUN 2014

INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI

KABUPATEN LEBONG 2014

Construction Expensiveness Index of Lebong Regency 2014

Nomor ISBN / ISBN Number : 978-602-6853-15-8

Katalog BPS / BPS Catalog : 7102025.1707

Nomor Publikasi / Publication Number : 1707.1503

Ukuran Buku / Book Size : 21 x 29.7 cm

Jumlah Halaman / Number of Pages : vii + 44

Naskah / Manuscript :

Seksi Statistik Distribusi / Division of Distribution Statistics

Gambar Kulit / Cover Design :

Seksi Statistik Distribusi / Division of Distribution Statistics

Diterbitkan Oleh / Published by :

©BPS Kabupaten Lebong / BPS-Statistic of Lebong Regency

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

Prohibited to announce, distribute, communicate, and/or copy part or all of this book for commercial purpose without permission from BPS-Statistics Indonesia.

KATA PENGANTAR

Sejak diberlakukannya Otonomi Daerah, pemerintah daerah dapat mendayagunakan potensi keuangan daerahnya masing-masing sebagai bagian dari perwujudan keberhasilan pembangunan nasional. Bagaimanapun, ketersediaan dana sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan dan sumber pendapatan daerah kabupaten/kota yang utama adalah dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Agar pembagian DAU ke daerah menjadi adil, proporsional dan merata, diperlukan dukungan data dasar yang valid, akurat dan terkini. Kebutuhan fiskal yang dianggarkan melalui DAU dihitung berdasarkan berbagai komponen, salah satunya adalah Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).

Untuk itu, dengan diterbitkannya publikasi Indeks Kemahalan Konstruksi kabupaten Lebong 2014 ini, diharapkan agar bahan perencanaan pembangunan bagi pemerintah daerah dapat terpenuhi sehingga pembangunan akan lebih baik dan terarah.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan publikasi ini. Semoga publikasi ini dapat bermanfaat dan memenuhi harapan pengguna data.

Tubei, Oktober 2015
Kepala BPS Kabupaten Lebong



Yulian Efendi, SE

DAFTAR ISI

KATALOG.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	3
BAB 2. KONSEP DAN DEFINISI.....	4
2.1 Tingkat Kemahalan Konstruksi.....	4
2.2 Indeks Kemahalan Konstruksi.....	4
2.3 Kelompok Jenis Bangunan.....	7
BAB 3. METODOLOGI.....	11
3.1 Pengumpulan Data.....	11
3.2 Metodologi.....	12
3.3 Paket Komoditas.....	14
3.4 Rekonsiliasi Harga.....	15

3.5	Estimasi Harga.....	15
3.6	Diagram Timbang (DT) atau Bobot.....	16
3.7	Sistem Konstruksi.....	19
3.8	Komponen Konstruksi.....	20
3.9	Prosedur Penghitungan Penimbang.....	21
3.10	Formula Penghitungan IKK.....	25
3.11	Perbedaan Dengan IKK 2013.....	28
BAB 4.	PROFIL KABUPATEN LEBONG.....	30
4.1	Keadaan Geografis.....	30
4.2	Penduduk.....	31
4.3	Keuangan Daerah.....	32
4.4	Potensi Ekonomi.....	36
BAB 5	INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI KABUPATEN LEBONG.....	40
5.1	IKK Kabupaten Lebong 2014.....	40
5.2	Perbandingan IKK antar Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu.....	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Lebong.....	31
Gambar 2. Perkembangan Dana ALokasi Umum Kabupaten Lebong, 2010-2014.....	33
Gambar 3. Peta Indeks Kemahalan Konstruksi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, 2014.....	43

<https://lebongkab.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Rasio Jenis Kelamin, Kepadatan Penduduk dan Kecamatan di Kabupaten Lebong Tahun 2014.....	32
Tabel 2. Rencana dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Daerah Kabupaten Lebong, Tahun 2014.....	34
Tabel 3. Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Lebong, Tahun 2014.....	36
Tabel 4. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lebong menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku, 2011-2014.....	38
Tabel 5. Nilai Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten/Kota Di Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2014.....	42

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan otonomi daerah (Otda) yang diundangkan pada tahun 2000 diarahkan untuk mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan di semua daerah. Dengan penerapan kebijakan ini diharapkan tujuan nasional yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Tujuan lain dari kebijakan Otda adalah pemerataan kemampuan keuangan antar daerah sehingga ketimpangan antar daerah dapat teratasi. Pemerintah daerah terutama yang masih tertinggal diharapkan mampu mengelola keuangan daerah dan memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di daerahnya sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat.

Kebijakan Otonomi Daerah yang dikeluarkan pemerintah sejak tanggal 1 Januari 2001 dilandasi oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pembangunan terdesentralisasi yang telah diterapkan selama ini membutuhkan suatu indikator guna perimbangan keuangan daerah otonom.

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan Otonomi Daerah di daerah perlu didukung dengan penyediaan statistik yang dapat mencerminkan kebutuhan daerah dan harus memenuhi kriteria:

- a. mempunyai kredibilitas yang tinggi,
- b. mutakhir, dan
- c. mempunyai validitas dan akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu dana perimbangan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan otonomi daerah antara lain adalah Dana Alokasi Umum (DAU). DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 21.

DAU merupakan instrument transfer yang dimaksudkan untuk meminimumkan ketimpangan fiskal antar daerah, sekaligus pemerataan kemampuan antar daerah. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) menjadi komponen penting dalam perumusan Dana Alokasi Umum (DAU) disamping Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Luas Wilayah, dan Angka Produk Domestik Bruto (PDRB) perkapita.

1.2 Tujuan

Tujuan dilakukannya penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi tahun 2014 adalah untuk memperoleh gambaran tingkat kesulitan geografis suatu daerah, menyediakan data dasar dalam rangka kebijakan dana perimbangan 2014 dan utamanya digunakan sebagai salah satu variable kebutuhan fiskal dalam penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk pengalokasian tahun 2014.

<https://lebongkab.bps.go.id>

BAB 2

KONSEP DAN DEFINISI

2.1. Tingkat Kemahalan Konstruksi

Tingkat Kemahalan Konstruksi (TKK) merupakan cerminan dari suatu nilai bangunan/konstruksi, yaitu biaya yang dibutuhkan untuk membangun 1 (satu) unit bangunan persatuan ukuran luas di suatu kabupaten/kota atau provinsi. TKK diperoleh melalui pendekatan terhadap harga sejumlah bahan bangunan/konstruksi dan harga sewa alat berat yang mempunyai nilai atau andil cukup besar dalam bangunan tersebut.

2.2. Indeks Kemahalan Konstruksi

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) adalah angka indeks yang menggambarkan perbandingan TKK suatu kabupaten/kota atau provinsi terhadap TKK kabupaten/kota atau provinsi lain. Sesuai dengan pengertiannya, IKK dapat dikategorikan sebagai indeks spasial, yaitu indeks yang menggambarkan perbandingan harga untuk wilayah yang berbeda pada periode waktu tertentu. Berbeda dengan pengertian indeks periodikal atau temporal yang selama ini sudah kita kenal, seperti Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) atau Indeks Harga Konsumen (IHK), kedua indeks harga

tersebut menggambarkan perkembangan harga di suatu wilayah pada periode waktu tertentu terhadap harga periode tahun dasar.

IKK digunakan sebagai *proxy* untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut. Tidak ada dua gedung kantor yang identik atau jembatan yang sama persis karena masing-masing memiliki karakter dan desain yang dibuat khusus untuk ditempatkan pada lokasi masing-masing.

Penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), karenanya, didasarkan atas suatu pendekatan atau kompromi tertentu. Misalnya yang menjadi objek adalah bangunan tempat tinggal, maka bangunan tempat tinggal tersebut harus mengakomodir berbagai macam rancangan dan model.

Untuk tujuan membandingkan harga konstruksi antar wilayah/daerah, dikenal ada dua metoda penghitungan, yaitu pertama dengan pendekatan input, dan kedua dengan pendekatan harga output. Pendekatan harga input yaitu dengan mencatat semua material penting yang digunakan digabung dengan upah dan sewa peralatan sesuai dengan bobotnya masing-masing. Kelemahan metoda ini adalah bahwa kegiatan konstruksi dianggap mempunyai produktivitas yang sama dan tidak mempertimbangkan *overhead cost*. Pendekatan output dilakukan dengan cara menanyakan harga konstruksi yang sudah jadi. Pada pendekatan output kelemahannya adalah bahwa dalam harga bangunan sudah termasuk manajemen

cost dan keuntungan kontraktor yang bervariasi antar daerah dan antar proyek sehingga tidak memadai untuk tujuan membandingkan kemahalan konstruksi antar wilayah.

Alternatifnya adalah mengumpulkan harga konstruksi yang bisa mencakup *overhead cost* dan produktivitas pekerja tanpa memasukan manajemen *cost* dan keuntungan kontraktor. Caranya adalah dengan mengumpulkan harga komponen bangunan seperti harga dinding, atap, dan sebagainya. Apabila harga-harga komponen tersebut digabungkan maka akan didapatkan harga total proyek yang besarnya berada diatas harga input tetapi dibawah harga output karena sudah memasukkan *overhead cost* dan upah tetapi mengeluarkan biaya manajemen dan keuntungan kontraktor. Data seperti ini bisa didapatkan dari dokumen *Bill of Quantity* (BoQ) satu proyek yang sudah selesai.

Dengan digunakannya realisasi APBD pembentukan modal tetap sebagai salah satu penimbang IKK, maka setiap tahun IKK satu kabupaten/kota relatif terhadap kabupaten/kota berubah-ubah tergantung dari realisasi APBD masing-masing kabupaten/kota.

Sejak Tahun 2005, IKK disajikan dengan memperhitungkan pula perkembangan harga periode tertentu terhadap harga periode dasar (Februari 2004, harga yang digunakan dalam penghitungan IKK 2004). Mulai tahun 2010 IKK disajikan dengan model yang berbeda, dimana Kota Samarinda sebagai kota acuan dan Provinsi Kalimantan Timur sebagai provinsi acuan.

2.3. Kelompok Jenis Bangunan

Pada awal penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi, Kelompok bangunan/konstruksi yang digunakan terdiri dari 5 kelompok bangunan/konstruksi yaitu: Bangunan Tempat Tinggal dan Bukan Tempat Tinggal; Bangunan Pekerjaan Umum Untuk Pertanian, Bangunan Pekerjaan Umum Untuk Jalan, Jembatan dan Pelabuhan, Bangunan dan Instalasi Listrik, Gas, Air Minum, dan Komunikasi, dan Bangunan Lainnya. Namun karena tidak semua kabupaten/kota memiliki kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pembangunan fisik berupa Bangunan Pekerjaan Umum Untuk Pertanian dan Bangunan untuk Instalasi Listrik, Gas, Air Minum, dan Komunikasi, maka mulai tahun 2005 kelompok bangunan yang digunakan untuk penghitungan IKK terdiri dari 3 kelompok bangunan/konstruksi, yaitu:

- I. Bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal,
- II. Pekerjaan umum untuk jalan, jembatan dan pelabuhan, dan
- III. Bangunan lainnya.

I. Bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, kegiatan konstruksi yang termasuk dalam kelompok jenis bangunan ini adalah sebagai berikut :

1. Konstruksi gedung tempat tinggal, meliputi: rumah yang dibangun sendiri, real estate, rumah susun, dan perumahan dinas
2. Konstruksi gedung bukan tempat tinggal, meliputi: konstruksi gedung perkantoran, industri, kesehatan, pendidikan, tempat hiburan, tempat ibadah, terminal/stasiun dan bangunan monumental.

II. Bangunan pekerjaan umum untuk jalan, jembatan, dan pelabuhan, kegiatan konstruksi yang masuk dalam kelompok jenis bangunan ini adalah :

1. Bangunan jalan, jembatan, dan landasan, meliputi: pembangunan jalan, jembatan, landasan pesawat terbang, pagar/tembok, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu lalu lintas.
2. Bangunan jalan dan jembatan kereta, pembangunan jalan dan jembatan kereta.
3. Bangunan dermaga, meliputi: pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan dermaga/pelabuhan, sarana pelabuhan, dan penahan gelombang.

III. Bangunan lainnya, meliputi kegiatan pekerjaan umum untuk pertanian, instalasi listrik, gas, air minum, komunikasi, dan lainnya, diantaranya:

1. Pemasangan perancah, pemasangan bangunan konstruksi prefab dan pemasangan kerangka baja, pengerukan, konstruksi khusus lainnya, instalasi jaringan pipa, instalasi bangunan sipil lainnya, dekorasi eksterior, serta bangunan sipil lainnya termasuk peningkatan mutu tanah melalui pengeringan dan pengerukan.
2. Bangunan elektrikal, meliputi: pembangkit tenaga listrik, transmisi dan transmisi tegangan tinggi.
3. Konstruksi telekomunikasi udara, meliputi konstruksi bangunan telekomunikasi dan navigasi udara, bangunan pemancar/penerima radar, dan bangunan antenna.
4. Konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api, pembangunan konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api.
5. Konstruksi sentral telekomunikasi, meliputi: bangunan sentral telepon/telegraf, konstruksi bangunan menara pemancar/penerima radar microwave, dan bangunan stasiun bumi kecil/stasiun satelit, instalasi air, meliputi: instalasi air bersih dan air limbah dan saluran drainase pada gedung.

6. Instalasi listrik, meliputi: pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan lemah dan pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan kuat.
7. Instalasi gas, meliputi: pemasangan instalasi gas pada gedung tempat tinggal dan pemasangan instalasi gas pada gedung bukan tempat tinggal.
8. Instalasi listrik jalan, meliputi: instalasi listrik jalan raya, instalasi listrik jalan kereta api, dan instalasi listrik lapangan udara.
9. Instalasi jaringan pipa, meliputi: jaringan pipa gas, jaringan air, dan jaringan minyak.
10. Bangunan terowongan, Bangunan sipil lainnya (lapangan olahraga, lapangan parkir, dan sarana lingkungan pemukiman).

BAB 3

METODOLOGI

3.1 Pengumpulan Data

Pada tahun 2012, pengumpulan data harga dilakukan secara bulanan menggunakan daftar HPB-K2 di 105 kabupaten/kota. Data harga yang dikumpulkan terdiri dari 60 jenis barang yang mencakup sekitar 145 kualitas barang. Untuk keperluan penghitungan IKK 2014, selain survei HPB-K2, dilakukan pula survei serentak khusus untuk barang-barang konstruksi yang menjadi paket komoditas IKK. Pengumpulan data kuantitas atau volume barang-barang konstruksi dan sewa alat berat tersebut diperoleh melalui kegiatan yang disebut Studi Tingkat Kemahalan Konstruksi. Kegiatan studi ini dilakukan di 20 (dua puluh) kabupaten/kota terpilih yang menyebar di 10 (sepuluh) provinsi yang dilaksanakan pada bulan April 2003 dan April 2004. Kabupaten/kota-kabupaten/kota tersebut dipilih berdasarkan letak dan kondisi geografis serta struktur tanah yang berbeda sehingga data yang diperoleh dapat mewakili keseluruhan kondisi kabupaten/kota di Indonesia.

Dalam menyusun diagram timbang kelompok jenis bangunan, selain data hasil studi, ditunjang pula dengan data tabel Input-Output dan data yang diperoleh dari instansi terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum. Data diagram timbang kelompok jenis bangunan

ini, dari tahun ke tahun selalu di *up-date* berdasarkan perkembangan data penunjang.

Dengan asumsi bahwa penggunaan (kuantitas/volume) barang untuk membangun satu unit bangunan per satuan ukuran luas di masing-masing kabupaten/kota adalah sama, maka diagram timbang kelompok jenis bangunan yang digunakan pun sama untuk seluruh kabupaten/kota.

Data lain yang dikumpulkan adalah perkiraan persentase pengeluaran kegiatan pembangunan fisik gedung/konstruksi masing-masing kelompok jenis bangunan terhadap total nilai pengeluaran kegiatan pembangunan tersebut. Data ini diperoleh dari masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota.

3.2 Metodologi

IKK dihitung menurut kelompok jenis bangunan yang mengacu pada klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI). Seperti halnya IKK 2013, penghitungan IKK 2014 juga menggunakan 3 (tiga) kelompok jenis bangunan, yaitu:

- a) Bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal;
- b) Bangunan pekerjaan untuk jalan, jembatan, dan pelabuhan;
dan
- c) Bangunan lainnya

Pada tahun 2009 dan tahun-tahun sebelumnya, angka IKK rata-rata nasional sama dengan 100, Mulai tahun 2010 angka IKK rata-rata tidak berdasarkan rata-rata nasional tetapi berdasarkan IKK Kota Samarinda. Pemilihan Kota Samarinda sebagai rata-rata IKK disebabkan Kota Samarinda sebagai salah satu ibukota provinsi dimana terdapat salah satu kabupaten pada provinsi tersebut yaitu Kabupaten Balikpapan memiliki nilai IKK mendekati 100,00. Karena Indeks Kemahalan Konstruksi menggunakan indeks spasial, dimana fungsi indeks untuk membandingkan antar daerah pada waktu yang bersamaan, maka penghitungan IKK 2010 menggunakan salah satu ibukota provinsi sebagai "kota dasar" untuk dibandingkan dengan kabupaten/kota yang lain.

Sebagaimana diketahui bahwa IKK sudah dihitung sejak tahun 2003. Penimbang yang digunakan untuk menghitung IKK adalah BoQ tahun 2003. Perkembangan teknik sipil sangat cepat ditambah lagi dengan pesatnya industri bahan bangunan. Saat ini material yang digunakan untuk kegiatan konstruksi sudah banyak yang berubah atau muncul model baru seperti batako ringan, atap baja ringan, kusen aluminium, dsb. Peraturan Pemerintah baik pusat maupun daerah yang mempengaruhi kegiatan konstruksi juga banyak berubah. Hal-hal tersebut mengakibatkan BoQ 2003 yang selama ini digunakan untuk menghitung IKK tidak lagi sesuai dengan kondisi di lapangan. Oleh karena itu mulai tahun 2013 penghitungan IKK sudah menggunakan BoQ terbaru yang dikumpulkan pada tahun

2012. Sedangkan IKK tahun 2014 menggunakan penimbang yang lebih lengkap dan *up to date* dengan menggunakan BoQ tahun 2012 dan updating BoQ tahun 2013.

IKK tahun 2014 menggunakan data harga komoditi yang dikumpulkan dalam 4 periode pencacahan yaitu akhir Juli 2013, akhir Oktober 2013, akhir Januari 2014 dan akhir April 2014. Periode-periode tersebut mencakup masa perencanaan dan pembangunan suatu proyek konstruksi, sehingga lebih menggambarkan fluktuasi harga di bidang konstruksi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya menggunakan 2 periode pencacahan.

3.3 Paket Komoditas

Paket komoditas yang digunakan dalam penghitungan IKK 2014 sebanyak 22 komoditas yaitu terdiri dari 17 jenis barang, yaitu: pasir pasang, batu kali, kayu papan, kayu balok, kayu lapis, cat tembok, cat kayu/besi, aspal, pipa PVC, kaca, batu bata, semen, batu split, lantai keramik, besi beton, seng plat, seng gelombang, 4 sewa alat berat yaitu: *excavator*, *bulldozer*, *three wheel roller* (mesin gilas), *dump truck*, dan upah.

Jenis barang dan sewa alat berat tersebut dipilih karena mempunyai nilai atau andil cukup besar dalam membuat masing-masing kelompok jenis bangunan serta harga barang-barang

tersebut *comparable* atau mempunyai keterbandingan antar kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

3.4 Rekonsialisi Harga

Setelah menentukan kualitas nasional, maka dilakukan kegiatan rekonsiliasi data untuk memastikan harga komoditi yang dikumpulkan pada saat survei sesuai kualitas/merk maupun satuannya. Rekonsiliasi dilaksanakan di seluruh provinsi dengan peserta kasie distribusi kabupaten. Peserta diharapkan memahami data lapangan sehingga segala permasalahan di lapangan bisa didiskusikan.

3.5 Estimasi Harga

IKK merupakan indeks spasial yang akan digunakan sebagai pendekatan terhadap tingkat kesulitan geografis antar daerah sehingga data harga harus mempunyai tingkat keterbandingan, yaitu mempunyai kualitas dan satuan yang standar untuk seluruh tempat/daerah. Untuk daerah yang tidak terdapat barang sesuai kualitas dalam paket komoditas IKK akan dilakukan estimasi harga untuk mendapatkan data harga jenis barang dengan mendapatkan harga pada kualitas provinsi selanjutnya disesuaikan harganya sehingga sesuai kualitas nasional.

3.6 Diagram Timbang (DT) atau Bobot

Pengumpulan data harga di sektor konstruksi menggunakan pendekatan *Basket of Construction Components* (BOCC)¹. Metode pendekatan ini didesain untuk tujuan perbandingan antar wilayah. Data harga yang dikumpulkan terdiri dari komponen konstruksi utama dan input dasar yang umum dalam suatu wilayah.

Komponen konstruksi adalah output fisik konstruksi yang diproduksi sebagai tahap *intermediate* dalam proyek konstruksi. Elemen kunci dalam proses pendekatan ini adalah semua harga yang diestimasi berhubungan dengan komponen yang dipasang, termasuk biaya material, tenaga kerja, dan peralatan. Tujuan penggunaan pendekatan BOCC adalah memberikan perbandingan harga konstruksi yang lebih sederhana dan biaya yang murah dan memungkinkan menggunakan metode *Bill of Quantity* (BOQ).

Pendekatan BOCC didasarkan pada harga 2 jenis komponen, yakni komponen gabungan dan input dasar. Selanjutnya untuk tujuan estimasi perbandingan antar wilayah, komponen-komponen tersebut dikelompokkan dalam bentuk sistem-sistem konstruksi. Sistem-sistem tersebut selanjutnya dikelompokkan ke dalam *basic heading*.

Sektor konstruksi diklasifikasikan ke dalam 3 kategori yang disebut sebagai *basic heading* yaitu:

1. Gedung dan bangunan
2. Jalan, irigasi, dan jaringan

3. Bangunan lainnya.

Gedung dan Bangunan yang termasuk dalam lingkup penghitungan diagram timbang IKK adalah sebagai berikut:

1. Konstruksi gedung tempat tinggal, meliputi: rumah yang dibangun sendiri, *real estate*, rumah susun, dan perumahan dinas.
2. Konstruksi gedung bukan tempat tinggal, meliputi: konstruksi gedung perkantoran, industri, kesehatan, pendidikan, tempat hiburan, tempat ibadah, terminal/stasiun dan bangunan monumental.

Klasifikasi Jalan, irigasi, dan jaringan yang termasuk dalam penghitungan diagram timbang adalah sebagai berikut:

1. Bangunan pekerjaan umum untuk pertanian
 - a. Bangunan pengairan, meliputi: pembangunan waduk (*reservoir*), bendung (*weir*), embung, jaringan irigasi, pintu air, sipon dan *drainase* irigasi, talang, *check dam*, tanggul pengendali banjir, tanggul laut, krib, dan viaduk.
 - b. Bangunan tempat proses hasil pertanian, meliputi: bangunan penggilingan, dan bangunan pengeringan.
2. Bangunan pekerjaan umum untuk jalan, jembatan, dan pelabuhan

- a. Pembangunan jalan, jembatan, landasan pesawat terbang, pagar/tembok, *drainase* jalan, marka jalan, dan rambu-rambu lalu lintas.
 - b. Bangunan jalan dan jembatan kereta meliputi pembangunan jalan dan jembatan kereta.
 - c. Bangunan dermaga, meliputi: pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan dermaga/pelabuhan, sarana pelabuhan, dan penahan gelombang.
3. Bangunan untuk instalasi listrik, gas, air minum, dan komunikasi
- a. Bangunan elektrik, meliputi: pembangkit tenaga listrik, transmisi dan transmisi tegangan tinggi.
 - b. Konstruksi telekomunikasi udara, meliputi konstruksi bangunan telekomunikasi dan navigasi udara, bangunan pemancar/penerima radar, dan bangunan antena.
 - c. Konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api, pembangunan konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api.
 - d. Konstruksi sentral telekomunikasi, meliputi: bangunan sentral telepon/telegraf, konstruksi bangunan menara pemancar/penerima radar microwave, dan bangunan stasiun bumi kecil/stasiun satelit.
 - e. Instalasi air, meliputi: instalasi air bersih dan air limbah dan saluran *drainase* pada gedung.

- f. Instalasi listrik, meliputi: pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan lemah dan pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan kuat.
- g. Instalasi gas, meliputi: pemasangan instalasi gas pada gedung tempat tinggal dan pemasangan instalasi gas pada gedung bukan tempat tinggal.
- h. Instalasi listrik jalan, meliputi: instalasi listrik jalan raya, instalasi listrik jalan kereta api, dan instalasi listrik lapangan udara.
- i. Instalasi jaringan pipa, meliputi: jaringan pipa gas, jaringan air, dan jaringan minyak.

Sedangkan jenis bangunan yang tercakup dalam klasifikasi bangunan lainnya adalah sebagai berikut: bangunan terowongan, bangunan sipil lainnya (lapangan olahraga, lapangan parkir, dan sarana lingkungan pemukiman), pemasangan perancah, pemasangan bangunan konstruksi *prefab* dan pemasangan kerangka baja, pengerukan, konstruksi khusus lainnya, instalasi jaringan pipa, instalasi bangunan sipil lainnya, dekorasi eksterior, serta bangunan sipil lainnya termasuk peningkatan mutu tanah melalui pengeringan dan pengerukan.

3.7 Sistem Konstruksi

Sistem menurut konsep pendekatan BOCC adalah suatu kumpulan komponen dalam suatu proyek konstruksi yang bisa

menjalankan suatu fungsi tertentu. Sistem adalah struktur dalam sebuah bangunan yang diklasifikasikan kembali kedalam kumpulan komponen bertujuan untuk mendukung bangunan seperti pondasi, atap, eksterior dan interior, dan lainnya. Sistem konstruksi pada bangunan rumah dan gedung berbeda dengan klasifikasi jenis bangunan lainnya. Berikut adalah jenis sistem untuk bangunan rumah dan gedung, dan sistem untuk klasifikasi jenis bangunan lainnya.

3.8 Komponen Kontruksi

Komponen adalah kombinasi dari beberapa material pada lokasi akhir yang dapat diidentifikasi secara jelas pada tujuannya dalam sebuah proyek bangunan dan juga sistemnya. Contoh komponen adalah beton, pengecatan eksterior, pengecatan interior, pondasi kolom, dan lainnya. Sebuah komponen secara umum terdiri dari beberapa material, tenaga kerja dan peralatan.

Biaya masing-masing komponen disusun dari biaya per unit dari material yang digunakan dan perkiraan kuantitas dari material, koefisien dan upah tenaga kerja, koefisien dan sewa peralatan yang digunakan untuk membangun komponen tersebut. Konsep yang mendasar dari pendekatan BOCC adalah mengukur relatif harga pada level komponen konstruksi. Sebuah komponen kemudian dibagi-bagi kembali kedalam beberapa item pekerjaan konstruksi. Komponen konstruksi dapat dianggap sebagai agregasi dari

beberapa item pekerjaan konstruksi yang meliputi material, tenaga kerja, dan peralatan yang diperlukan untuk menyelesaikan item pekerjaan tersebut.

Komponen-komponen yang digunakan dalam penghitungan diagram timbang IKK 2014 berbeda antara bangunan 1 (bangunan tempat tinggal) dan bangunan 2 (bangunan umum untuk pertanian, bangunan umum untuk jalan, jembatan, dan pelabuhan, bangunan umum untuk jaringan air listrik, dan komunikasi) bangunan 3 (bangunan lainnya).

Pendekatan BOCC menggunakan 3 sistem penimbang, yaitu:

1. W1 adalah penimbang yang digunakan pada level agregasi jenis bangunan seperti bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan umum untuk pertanian, jalan, jembatan, dan jaringan, dan bangunan lainnya.
2. W2 adalah penimbang untuk agregasi pada level sistem konstruksi.
3. W3 adalah penimbang untuk agregasi pada level komponen yang termasuk upah tenaga kerja dan sewa peralatan konstruksi.

3.9 Prosedur Penghitungan Penimbang

Langkah awal yang dilakukan untuk menghitung penimbang IKK adalah mengumpulkan *Bill of Quantity* (BoQ). Pengumpulan BoQ ini dilakukan melalui survei diagram timbang IKK tahun 2013. BoQ

yang dikumpulkan dalam survei ini adalah BoQ realisasi pembangunan suatu konstruksi selama tahun 2013 di kabupaten/kota yang bersangkutan. Jika tidak ada pembangunan selama tahun 2013 maka bisa digantikan dengan BoQ dari pembangunan pada tahun 2012. BoQ ini dikumpulkan dari masing-masing kabupaten/kota agar setiap kabupaten/kota memiliki penimbang yang sesuai dengan karakteristik pembangunan di wilayahnya masing-masing.

Tahapan penghitungan diagram timbang dari data BoQ untuk masing-masing kabupaten-kota adalah sebagai berikut:

1. Pengkodean Data BoQ

Pengkodean merupakan langkah awal yang dilakukan dalam pengolahan data BoQ. Terdapat beberapa macam kode yang diberikan, diantaranya:

- a) Melakukan pengkodean jenis bangunan dan kabupaten/kota untuk masing-masing jenis dokumen BoQ yang dikumpulkan.
- b) Melakukan pengkodean sistem pada setiap uraian pekerjaan yang terdapat dalam BoQ
- c) Melakukan pengkodean jenis komponen dari setiap uraian pekerjaan yang terdapat dalam BoQ.

2. Menghitung *share* nilai untuk masing-masing tahapan penimbang (W1, W2, dan W3) setiap kabupaten/kota

- a) Menghitung penimbang W1 setiap kabupaten/kota

Pada tahapan penimbang W1 dihitung share nilai setiap sistem untuk masing-masing bangunan.

Nilai sistem adalah jumlah nilai dari seluruh bahan bangunan, upah tenaga kerja, sewa peralatan yang digunakan dalam suatu sistem konstruksi. Penimbang W1 diperoleh dengan menggunakan rumus berikut:

$$W1_i = \frac{\text{Nilai Sistem}_i}{\sum_{i=1}^{n1} \text{Nilai Sistem}_i}$$

$n1 = 1,2, \dots, 8$ untuk bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal

$n1 = 1,2, \dots, 6$ untuk bangunan selainya.

b) Menghitung penimbang W2 setiap kabupaten/kota

Pada tahapan penimbang W2 dihitung *share* nilai setiap komponen untuk masing-masing sistem.

Nilai komponen adalah: jumlah nilai dari seluruh bahan bangunan, upah tenaga kerja, sewa peralatan yang digunakan dalam sebuah komponen konstruksi. Penimbang W2 bisa diperoleh dengan rumus berikut:

$$W2_{ij} = W1_i \cdot \frac{\text{Nilai Komponen}_{ij}}{\sum_j^{n2} \text{Nilai Komponen}_{ij}}$$

$n2$ menunjukkan jumlah komponen dalam sistem yang bersangkutan.

- c) Menghitung *share* untuk penimbang W3 setiap kabupaten/kota

Pada tahapan penimbang W3 dihitung *share* nilai setiap komoditi untuk masing-masing komponen. Penimbang W3 bisa diperoleh dengan rumus berikut:

$$W3_{ijk} = W2_{ij} \cdot \frac{\text{Nilai Komoditi}_{ijk}}{\sum_k^{n3} \text{Nilai Komponen}_{ij}}$$

$n3$ menunjukkan jumlah komoditi pada komponen yang bersangkutan. Dimana:

$$\sum_i^{n1} W_i = 1$$

$$\sum_i^{n1} \sum_j^{n2} W_i$$

$$\sum_i^{n1} \sum_j^{n2} \sum_k^{n3} W_{ijk}$$

Selain sistem penimbang dengan menggunakan pendekatan BOCC, untuk menghitung IKK juga menggunakan penimbang umum (W0) yang digunakan sebagai penghubung masing-masing jenis bangunan menjadi suatu kesatuan konstruksi. Penimbang umum berasal dari realisasi anggaran daerah tingkat II (kabupaten/kota) untuk pembangunan konstruksi yang diperoleh melalui survei Keuangan Pemda Tingkat II (K-II) dari Subdirektorat Keuangan dan Teknologi Informasi dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dari data realisasi

anggaran daerah tingkat II untuk pembangunan masing-masing jenis bangunan diperoleh bobot masing-masing jenis bangunan ke total konstruksi di kabupaten/kota yang bersangkutan.

3.10 Formula Penghitungan IKK

Pada tahun 2012, seperti halnya diagram timbang kelompok jenis bangunan, IKK Kabupaten/kota dan IKK Provinsi juga dihitung menurut kelompok jenis bangunan yang mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Pada tahun 2004 angka IKK rata-rata nasional sama dengan 100, untuk tahun 2005 angka IKK rata-rata nasional disesuaikan menjadi 125,10; kenaikan sebesar 25,10 persen ini dihitung berdasarkan perkembangan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) barang-barang konstruksi dari bulan Februari 2004 ke bulan Mei 2005.

Pada tahun 2006 angka IKK rata-rata nasional adalah 150,92 disesuaikan dengan kenaikan IHPB barang-barang konstruksi dari bulan Februari 2004 ke bulan Mei 2006. Untuk tahun 2007 IKK rata-rata nasional adalah 170,17 disesuaikan dengan kenaikan IHPB barang-barang konstruksi dari bulan Februari 2004 ke bulan April 2007.

Selanjutnya melalui penyesuaian kenaikan IHPB konstruksi bulan Februari 2004 - Mei 2008 IKK rata-rata nasional tahun 2008 menjadi 204,79 dan 2009 menjadi 231,60 yang merupakan

penyesuaian kenaikan IHPB konstruksi bulan Februari 2004 - Mei 2009. Periode penyesuaian ini mengikuti bulan dilaksanakannya survei harga secara serentak diseluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Pada tahun 2014, penghitungan IKK dengan periode penyesuaian dilakukan sampai tahun 2010 sedangkan pada tahun 2010 menggunakan Kota Samarinda sebagai kota acuan. Kota Samarinda terpilih karena mempunyai nilai IKK yang mendekati 100 pada tahun 2010. Pada tahun 2014 Kota Samarinda tetap sebagai kota acuan dan inflator kembali digunakan sebagai periode penyesuaian kenaikan IHPB konstruksi tahun 2011-2014.

Misalkan p_{kn} adalah harga komponen konstruksi n di kabupaten k ($k= 1, 2, \dots, K$; $n= 1, 2, \dots, N$). Maka model statistik metoda Country Product Dummy (CPD) dituliskan sebagai

$p_{kn} = a_k b_n u_{kn}$, dalam hal ini $k= 1, 2, \dots, K$; $n= 1, 2, \dots, N$, a_k dan b_n merupakan parameter yang akan diduga dari data harga sedangkan u_{kn} merupakan random variabel yang berdistribusi identik dan independen. Dengan asumsi bahwa random variabel ini berdistribusi lognormal atau dengan kata lain $\log p_{kn}$ berdistribusi normal dengan mean 0 dan varian σ^2 , dalam bentuk logaritma model di atas berbentuk linier

$$\begin{aligned} \ln p_{kn} &= \ln a_k + \ln b_n + \ln u_{kn} \\ &= \alpha_k + \gamma_n + v_{kn} \end{aligned}$$

Parameter a_k diartikan sebagai tingkat harga konstruksi di kabupaten k relatif terhadap harga konstruksi di kabupaten lain yang sedang dibandingkan. Bila a_k dinyatakan sebagai relatif harga konstruksi terhadap kabupaten yang dijadikan referensi, katakan Kabupaten X , maka a_k adalah harga konstruksi di Kabupaten K relatif terhadap 1 (satu), yaitu harga di Kabupaten X . Dengan kata lain harga konstruksi di kabupaten K 'setinggi' a_k dibanding harga konstruksi di Kabupaten X . Karenanya IKK di Kabupaten K dinyatakan sebagai $IKK_k = \exp(\dots)$. Persamaan di atas dikalikan dengan 100 sehingga perbandingan data dinyatakan dalam persen.

Pada penghitungan IKK tahun 2013 ini Kota Samarinda dijadikan kota referensi dengan maksud supaya ada keterbandingan dengan IKK tahun sebelumnya. Untuk IKK tingkat provinsi data harga yang digunakan adalah rata-rata geometrik setiap komoditi dari seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi masing-masing dengan Provinsi Kalimantan Timur sebagai provinsi referensinya.

3.11 Perbedaan Dengan IKK 2013

IKK sudah dihitung sejak tahun 2003. Penimbang yang digunakan untuk menghitung IKK adalah BoQ tahun 2003. Perkembangan teknik sipil sangat cepat ditambah lagi dengan pesatnya industri bahan bangunan. Saat ini material yang digunakan untuk kegiatan konstruksi sudah banyak yang berubah atau muncul model baru seperti batako ringan, atap baja ringan, kusen aluminium, dsb. Peraturan Pemerintah baik pusat maupun daerah yang mempengaruhi kegiatan konstruksi juga banyak berubah. Hal-hal tersebut mengakibatkan BoQ 2003 yang selama ini digunakan untuk menghitung IKK tidak lagi sesuai dengan kondisi di lapangan. Oleh karena itu mulai tahun 2013 penghitungan IKK sudah menggunakan BoQ terbaru yang dikumpulkan pada tahun 2012. Sedangkan IKK tahun 2014 menggunakan penimbang yang lebih lengkap dan *up to date* dengan menggunakan BoQ tahun 2012 dan updating BoQ tahun 2013.

IKK tahun 2014 menggunakan data harga komoditi konstruksi, sewa alat berat dan upah tenaga kerja yang dikumpulkan dalam 4 periode pencacahan yaitu akhir Juli 2013, akhir Oktober 2013, akhir Januari 2014, dan akhir April 2014. Periode-periode tersebut mencakup masa perencanaan dan pembangunan suatu proyek konstruksi, sehingga lebih menggambarkan fluktuasi harga di bidang konstruksi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya menggunakan 2 periode pencacahan.

Tahapan Perhitungan

Semua data harga yang diperoleh dari survey serentak khusus barang-barang konstruksi dientri secara menyeluruh untuk semua kualitas barang dari seluruh Indonesia. Dari data yang masuk, dilakukan penyaringan untuk memperoleh satu kualitas terpilih yang dominan secara nasional dan untuk masing-masing provinsi. Kualitas terpilih masing-masing provinsi menjadi acuan untuk menentukan kualitas barang yang akan dibandingkan data harganya di dalam provinsi tersebut. Proses rekonsiliasi berlaku ketika proses penyeragaman kualitas barang di kabupaten/kota dalam satu provinsi disesuaikan dengan kualitas terpilih di provinsi tersebut.

Kemudian hasil rekonsiliasi masing-masing provinsi diperbandingkan dengan provinsi lain dengan kualitas nasional sebagai standar kualitas. Jika terdapat perbedaan kualitas atau satuan dari suatu provinsi, maka estimasi dilakukan untuk menyeragamkan kualitas dan satuannya sehingga harga barang dapat digunakan untuk menghitung Indeks Kemahalan Konstruksi

BAB 4

PROFIL KABUPATEN LEBONG

4.1 Keadaan Geografis

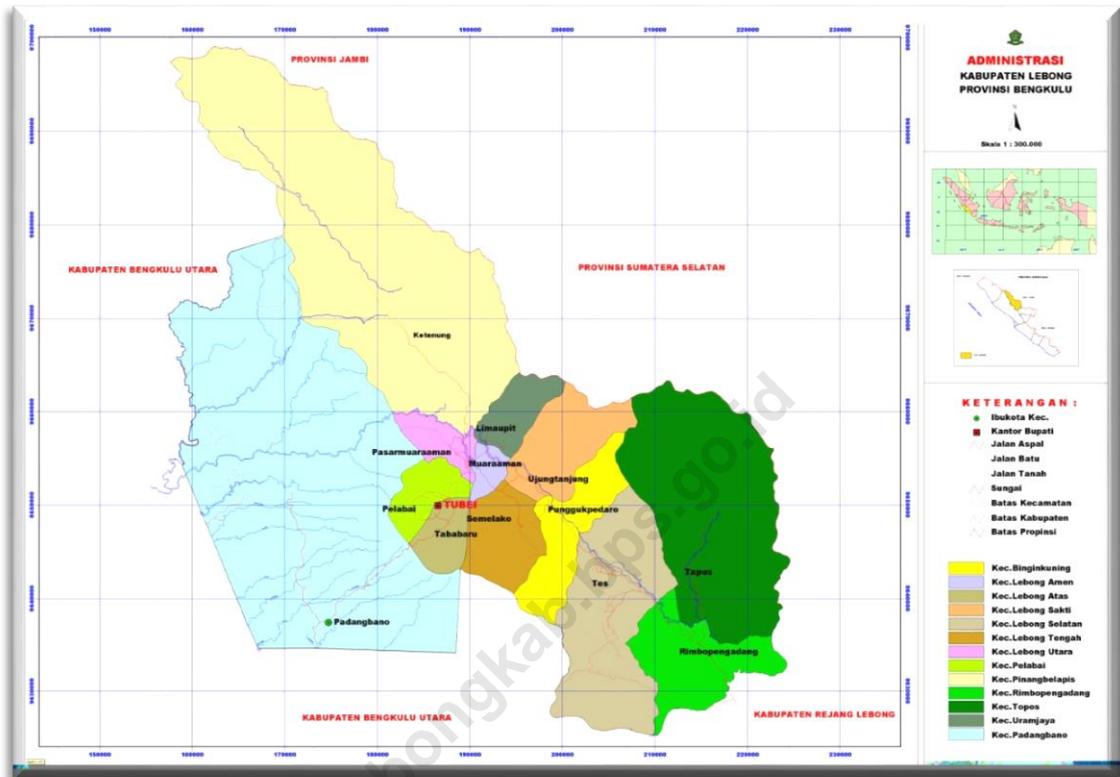
Kabupaten Lebong secara resmi berdiri pada tanggal 7 Januari 2004 berdasarkan UU No 39 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahyang. Induk kabupaten Lebong sebelumnya adalah Kabupaten Rejang Lebong. Pusat pemerintahan Kabupaten Lebong berada di Tubei tepatnya di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai.

Saat ini Kabupaten Lebong terdiri atas 13 Kecamatan dan 109 desa/kelurahan yang membentang dari tenggara hingga barat laut. Pada tahun 2014, pemerintah daerah Kabupaten Lebong memiliki 3.058 PNS yang sebagian besar adalah golongan III dan mempunyai pendidikan S1.

Sesuai dengan amanat Undang-undang, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebong berjumlah 25 orang sesuai dengan proporsi jumlah penduduk Kabupaten Lebong yang mencapai 107.296 jiwa. Berdasarkan komposisinya, anggota DPRD Kabupaten Lebong terdiri atas 18 orang laki-laki dan 7 orang perempuan.

Gambar 1

Peta Administrasi Kabupaten Lebong



Sumber: BPN Kabupaten Lebong

4.2 Penduduk

Jumlah penduduk Lebong pada tahun 2014 berjumlah 107.296 jiwa yang terdiri dari 54.815 laki-laki dan 52.481 perempuan. Ditinjau dari jenis kelamin, jumlah penduduk Kabupaten Lebong pada tahun 2014 yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari pada penduduk perempuan, dengan rasio jenis kelamin masih sama seperti tahun 2013 yaitu sebesar 104. Bila dilihat dari kepadatan penduduknya, kepadatan penduduk Lebong sebesar 61 jiwa per kilometer persegi. Kecamatan yang paling padat

penduduknya adalah Kecamatan Lebong Utara, hal ini sangat wajar karena Lebong Utara atau yang lebih dikenal sebagai Muara Aman merupakan pusat kegiatan ekonomi di Kabupaten Lebong.

Tabel 1
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Rasio Jenis Kelamin, Kepadatan Penduduk dan Kecamatan di Kabupaten Lebong Tahun 2014

Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Rasio Jenis Kelamin	Kepadatan Penduduk
	Laki-laki	Perempuan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Rimbo Pengadang	2 525	2 382	4 907	106	57,25
Topos	3 118	3 045	6 163	102	17,90
Lebong Selatan	7 509	7 161	14 670	105	69,30
Bingin Kuning	5 243	5 128	10 371	102	119,36
Lebong Tengah	5 441	5 278	10 719	103	151,04
Lebong Sakti	4 551	4 487	9 038	101	101,91
Lebong Atas	2 594	2 447	5 041	106	140,03
Padang Bano	2 882	2 330	5 212	124	-
Pelabai	3 602	3 399	7 001	106	171,97
Lebong Utara	8 341	8 160	16 501	102	514,05
Amen	3 809	3 704	7 513	103	434,78
Uram Jaya	2 713	2 715	5 428	100	126,38
Pinang Belapis	2 487	2 245	4 732	111	7,78
Jumlah	54 815	52 481	107 296	104	61,30

Sumber : Lebong Dalam Angka 2015

4.3 Keuangan Daerah

Dalam membangun daerah diperlukan sumber daya keuangan yang memadai sehingga pembangunan dapat tercapai secara maksimal. Akan tetapi, kondisi ideal keuangan yang diharapkan

untuk beberapa daerah di Indonesia masih sangat jauh termasuk Kabupaten Lebong. Walau demikian, pemanfaatan sumber daya yang tersedia perlu dilakukan secara efektif dan efisien sehingga hasilnya akan maksimal.

Pada tahun 2014, penerimaan Kabupaten Lebong sebesar 531,80 milyar yang terdiri atas pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 20,11 milyar, dana perimbangan sebesar 458,29 milyar dan lain-lain sebesar 53,38 milyar.

Gambar 2
Perkembangan Dana Alokasi Umum Kabupaten Lebong,
2010-2014



Tabel 2
Rencana dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana
Perimbangan Daerah Kabupaten Lebong, Tahun 2014

Uraian <i>Description</i>	Target <i>Target</i>	Realisasi <i>Realization</i>	
		Nilai <i>Value</i>	Persen <i>(%)</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
A.Pendapatan Asli Daerah	17 483,18	20 113,09	114,52
1. Pendapatan Pajak Daerah	3 470,00	3 989,45	114,97
2. Hasil Retribusi Daerah	1 262,67	1 050,07	83,16
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4 579,13	4 579,13	100,00
4. Lain-Lain PAD yang dipisahkan	8 171,38	10 494,44	128,43
B.Dana Perimbangan	459 484,70	458 289,93	99,74
1. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	25 773,84	24 579,07	95,36
2. Dana Alokasi Umum	373 700,22	373 700,22	100,00
3. Dana Alokasi Khusus	60 010,64	60 010,64	100,00
C.Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	64 179,81	53 375,99	83,17
1. Dana Bagi Hasil pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya	10 864,44	14 083,68	129,63
2. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	49 215,37	36 744,35	74,66
3. Pendapatan Lainnya	4 100,00	2 547,95	62,15
Jumlah/ Total			
2014	541 147,69	531 799,01	98,27
2013	468 822,86	457 733,98	97,63
2012	413 429,56	402 267,13	97,30
2011	389 292,78	386 300,50	99,23
2010	318 240,10	325 878,64	102,40

Sumber : Lebong Dalam Angka 2015

Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan oleh pemerintah pusat dari tahun-tahun selalu mengalami kenaikan (lihat Gambar 2). Pada Tahun 2010, DAU yang diperoleh Kabupaten Lebong sebesar 218,62 milyar meningkat menjadi 373,70 milyar pada tahun 2014.

Bila dilihat dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat Lebong terutama Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun 2014, hanya dua kecamatan di Kabupaten Lebong yang mencapai target pembayaran PBB sebesar 100%, yaitu kecamatan Uram Jaya dan Lebong Atas. Sedangkan Kecamatan yang memiliki persentase capaian target terendah adalah Kecamatan Pelabai yang hanya 30,40%. Bila hal ini dijadikan indikator partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat terhadap kemajuan wilayah belum maksimal.

Tabel 3
Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan
di Kabupaten Lebong, Tahun 2014

Kecamatan <i>Districts</i>	Target <i>Target (Rp)</i>	Realisasi <i>Realization</i>	
		(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)
Rimbo Pengadang	33 808 255	12 739 816	37,70
Topos	17 518 018	11 564 309	66,00
Lebong Selatan	142 687 483	483 960 578	339,10
Bingin Kuning	39 805 103	15 307 023	38,50
Lebong Sakti	33 883 787	27 251 789	80,40
Lebong Tengah	31 202 621	9 703 757	31,10
Amen	40 225 666	17 739 182	44,10
Uram Jaya	12 555 073	12 555 073	100,00
Lebong Utara	82 298 044	57 586 688	70,00
Pinang Belapis	18 730 921	16 122 374	86,10
Pelabai	25 820 676	7 857 138	30,40
Lebong Atas	21 569 373	21 569 373	100,00
Padang Bano	-	-	-
Jumlah/ Total			
2014	500 000 000	693 956 680	179,45
2013	504 704 779	328 559 776	64,46
2012	605 040 144	346 941 135	57,34
2011	520 354 149	343 901 883	66,09
2010	557 415 869	294 474 342	52,83

Sumber : Lebong Dalam Angka 2015

4.4 Potensi Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Lebong pada tahun 2014 mengalami percepatan dibandingkan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Lebong tahun 2014 mencapai 5,59 persen,

sedangkan tahun 2013 sebesar 5,56 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 9,82 persen dan yang terendah adalah lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang dengan pertumbuhan sebesar 1,20 persen.

Potensi ekonomi Kabupaten Lebong dapat dilihat dari struktur perekonomiannya yang didasari pada PDRB atas dasar harga berlaku, dimana perekonomian Kabupaten Lebong didominasi oleh Lapangan usaha pertanian dengan peranan sebesar 43,83 persen. Meskipun peran lapangan usaha ini masih dominan, namun jika dilihat dari trennya tampak gejala penurunan peranan pertanian setiap tahun.

Tabel 4
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lebong
menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku, 2011-2014
(Juta Rupiah/Million Rupiahs)

Lapangan Usaha/ Sectors	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	670 674,6	733 027,7	820 761,2	926 674,8
Pertambangan dan Penggalian	95 450,3	103 671,8	113 194,9	128 357,4
Industri Pengolahan	84 660,9	91 552,7	103 773,2	122 608,0
Pengadaan Listrik dan Gas	969,5	1 031,0	1 002,2	1 136,2
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4 985,9	5 359,9	5 603,0	5 943,1
Konstruksi	124 183,7	142 407,3	163 728,2	179 435,5
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	111 318,1	123 652,2	142 349,4	157 476,2
Transportasi dan Pergudangan	63 049,8	69 771,2	77 327,8	90 571,2
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	16 098,4	17 792,4	20 214,2	23 616,4
Informasi dan Komunikasi	24 178,5	26 193,8	30 530,2	34 504,8
Jasa Keuangan dan Asuransi	15 835,6	19 435,9	21 679,8	23 521,2

LANJUTAN TABEL

Lapangan Usaha/ Sectors	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Real Estate	88 347,1	95 463,4	107 845,8	120 593,5
Jasa Perusahaan	2 679,1	2 833,9	3 124,0	3 572,8
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	147 687,4	164 121,0	189 339,9	215 454,2
Jasa Pendidikan	35 924,0	40 503,4	46 798,3	53 614,4
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9 505,8	11 117,9	13 124,2	15 019,3
Jasa lainnya	8 933,1	9 502,3	10 026,5	11 929,1
PDRB	1 504 481,8	1 657 437,8	1 870 422,9	2 114 028,1

*Angka Sementara;

**angka sangat sementara

Sumber : Lebong Dalam Angka 2015

BAB 5

INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI

KABUPATEN LEBONG

5.1 IKK Kabupaten Lebong Tahun 2014

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) merupakan angka indeks yang menggambarkan perbandingan tingkat kemahalan harga bahan bangunan/konstruksi suatu kabupaten/kota atau provinsi lainnya. Tingkat Kemahalan Konstruksi merupakan cerminan dari suatu nilai bangunan/konstruksi atau biaya yang dibutuhkan untuk membangun 1 (satu) unit bangunan per satuan luas di suatu kabupaten/kota atau provinsi.

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Lebong Tahun 2014 telah dihitung untuk kabupaten/kota seluruh Indonesia termasuk diantaranya IKK kabupaten Lebong. IKK Kabupaten Lebong adalah sebesar 98,58 dan IKK Provinsi Bengkulu sebesar 96,21. Adapun IKK yang dijadikan patokan atau acuan adalah IKK Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur.

5.2 Perbandingan IKK antar Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu

Angka Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) kabupaten/ kota di provinsi Bengkulu pada tahun 2014 berkisar antara 94 sampai dengan 113. Berdasarkan tinggi rendahnya IKK, Kabupaten Lebong

berada di urutan ke-7 tertinggi setelah Mukomuko, Bengkulu Tengah, Kepahiang, Seluma, Kota Bengkulu, dan Kaur. Sedangkan untuk level provinsi, Provinsi Bengkulu berada di urutan ke-25. Provinsi dengan IKK terendah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 81,00 dan IKK tertinggi berada di Provinsi Papua sebesar 191,86

Sama halnya dengan tahun 2013, IKK terendah dalam Provinsi Bengkulu pada tahun 2014 ada di Rejang Lebong sebesar 94,64 hal ini berarti bahwa secara umum harga bahan bangunan di Rejang Lebong lebih murah dibandingkan dengan kabupaten lain dalam provinsi Bengkulu.

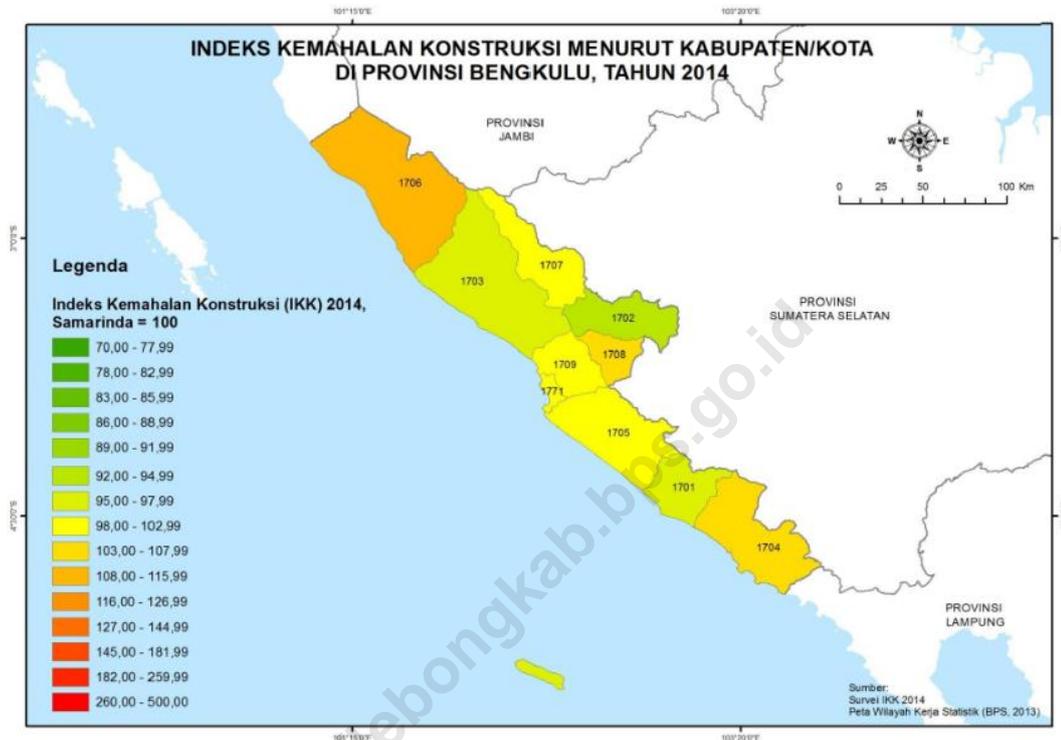
Nilai IKK yang berbeda-beda menunjukkan bahwa variasi harga bahan bangunan di masing-masing kabupaten/kota se-provinsi Bengkulu sebagai akibat dari bermacam-macam harga baik karena faktor distribusi maupun ketersediaan barang serta asal barang yang digunakan.

Tabel 5
Nilai Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten/Kota
Di Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2014

KODE	PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1700	BENGKULU	87,83	89,52	87,47	94,98	96,21
1701	BENGKULU SELATAN	90,68	97,85	92,32	94,44	97,89
1702	REJANG LEBONG	89,02	92,84	86,90	90,67	94,64
1703	BENGKULU UTARA	89,61	92,49	91,03	93,46	96,76
1704	KAUR	94,07	99,13	90,97	100,50	103,32
1705	SELUMA	89,47	92,95	96,48	101,78	102,14
1706	MUKOMUKO	91,70	93,61	97,42	110,67	112,53
1707	LEBONG	90,72	91,52	92,68	99,23	98,58
1708	KEPAHIANG	91,07	94,35	90,02	102,85	103,55
1709	BENGKULU TENGAH	88,46	90,94	96,53	104,49	102,43
1771	BENGKULU	88,08	86,86	96,44	100,93	99,45

Gambar 3

Peta Indeks Kemahalan Konstruksi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, 2014



Sebagai indeks spasial, besaran IKK lebih dipengaruhi oleh tingkat harga komoditas bahan bangunan antar wilayah dan tidak bisa dibandingkan dengan perkembangan harga antar waktu (*time series*) di suatu daerah. Perbedaan harga antar daerah, selain dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi seperti permintaan dan penawaran, juga dipengaruhi oleh faktor geografis seperti jarak antara daerah penghasil (pusat produksi) dan pusat distribusi dengan daerah atau lokasi penjualan. Di daerah-daerah yang jauh dari pusat produksi atau pusat distribusi, harga komoditas pada

umumnya lebih tinggi. Dengan kata lain, perbedaan harga barang antar daerah berkaitan erat dengan asal barang.

<https://lebongkab.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN LEBONG**

Jalan Raya Komplek Perkantoran Jalur Dua Tubei

Website : lebongkab.bps.go.id; e-mail : bps1707@bps.go.id; Telp : 0738-220032

ISBN 978-602-6853-15-8



9 786026 853158 >